

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan bernegara yaitu kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh pola kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah di negara tersebut. Iklim perekonomian yang stabil akan mampu mengantisipasi masalah-masalah perekonomian yang timbul diantaranya inflasi.

Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai di hampir semua Negara di dunia. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain.¹

Akibat buruk inflasi pada perekonomian yang oleh sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai stimulator bagi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa akan datang dan ini akan menyebabkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika

¹Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5: Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE, 1995. p. 112

inflasi lebih serius keadaannya perekonomian tidak akan berkembang seperti yang diinginkan. Pengalaman beberapa negara yang pernah mengalami hiperinflasi menunjukkan bahwa inflasi yang buruk akan menimbulkan ketidakstabilan social dan politik, dan tidak mewujudkan pertumbuhan ekonomi.²

Inflasi merupakan penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi begitu penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang senantiasa meningkat. Pengendalian inflasi penting untuk dilakukan karena didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.³ Dampak negatif tersebut antara lain, pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin akan bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Studi empiris Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi

² Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000. p. 121

³<http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/pentingnya.htm>, "Pentingnya kestabilan Inflasi".

tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Berkenaan dengan hal tersebut, upaya mengendalikan agar stabil begitu penting untuk dilakukan.

Inflasi merupakan indikator stabilitas perekonomian yang menjadi fokus perhatian dalam makroekonomi sehingga laju perubahannya selalu diupayakan berada pada tingkat yang rendah dan stabil. Untuk mewujudkan inflasi rendah, pengendaliannya di Indonesia dilakukan dengan menerapkan strategi pentargetan inflasi (*inflation targeting*). Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter diberikan independensi yang tinggi dalam menetapkan target-target yang ingin dicapai (*goal independency*) dan kebebasan dalam menggunakan instrumen kebijakan untuk mencapai target tersebut (*instrumen independency*).

Penetapan target inflasi tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah, karena proses pembentukan inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mencakup sejumlah besar barang dan jasa yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda-beda. Konsekuensinya, penetapan target inflasi membutuhkan kajian mendalam terhadap perilaku inflasi secara disagregat dan identifikasi sumber penyebabnya dari sisi permintaan dan penawaran, serta prediksi arah perubahan berbagai variabel makroekonomi. Hanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebutlah penetapan target inflasi dapat ditetapkan secara akurat untuk mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi agar tidak terlalu jauh menyimpang sehingga potensi ketidakstabilan perekonomian nasional ataupun regional dapat dikurangi.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memegang kendali yang sangat strategis dalam menciptakan kebijakan moneter yang stabil dalam perekonomian nasional. Namun dalam perjalanannya kebijakan Bank Indonesia yang dibuat atau kebijakan yang diambil Bank Indonesia menjadi tidak efektif dan bahkan tidak efisien sebagaimana yang diinginkan oleh bank Indonesia terhadap kebijakan tersebut untuk perekonomian. Bank Indonesia harus dapat mengukur peredaran uang, antara lain dengan menentukan tingkat suku bunga SBI, selain itu pemerintah juga memegang peranan penting dalam mengendalikan laju inflasi untuk itu salah satu kebijakannya adalah mengatur pengeluaran untuk pengeluaran rutinnya (*government expenditure*).

Dilain pihak sektor luar negeri juga cukup memegang peranan dalam mengendalikan inflasi diantaranya yaitu penerimaan *export*. Dengan demikian laju pertumbuhan inflasi dapat dikendalikan ditekan atau bahkan kemunculannya dapat dicegah. Oleh sebab itu dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil diperlukan adanya kerjasama dan kemitraan dari seluruh pelaku ekonomi baik bank indonesia, pemerintah maupun swasta inflasi tidak boleh diabaikan begitu saja, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Inflasi yang sangat tinggi sangat penting diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat. Dengan hal tersebut, upaya mengendalikan inflasi agar stabil sangat penting untuk dilakukan.

Inflasi di Indonesia pernah mencapai titik yang tertinggi yaitu pada pertengahan dasawarsa 1960-an dimana terjadi *hyper* inflasi yang melanda

perekonomian nasional dengan laju inflasi mencapai 650 persen. Hal tersebut terutama disebabkan oleh defisit anggaran belanja pemerintah yang kemudian dibiayai Bank Indonesia dalam bentuk pencetakan uang. Laju inflasi Indonesia selama tahun 1998-2010 menunjukkan adanya fluktuasi yang bervariasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor yang berbeda. Pada periode awal 1998, tingkat inflasi tinggi sebesar 77,63 persen, tingkat inflasi yang tinggi ini karena dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Selama tahun 1999-2000, tingkat inflasi Indonesia mengalami penurunan dan penurunan yang tertinggi terjadi pada bulan Januari 2000 yaitu sebesar 9,30 persen.

Laju inflasi tahunan dari tahun 2000-2004 sudah mulai stabil dimana angkanya yang berada dibawah dua digit. Inflasi tahun 2000 jika dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 meningkat secara tajam yaitu dari 2,01 persen menjadi 9,35 persen. Peningkatan laju inflasi ini diantaranya disebabkan adanya kenaikan tarif angkutan per 1 September 2000, kenaikan BBM per Oktober 2000, Bulan Puasa/Ramadhan (November 2000), Natal dan Lebaran (Desember 2000). Secara umum pada tahun 2000-2005, inflasi terus terjadi dengan nilai yang terbilang tinggi, yaitu dengan rata-rata mencapai 10 persen. Pada tahun 2005 laju inflasi kembali naik mencapai 17,11 persen.⁴

Ini adalah inflasi tertinggi pasca krisis moneter Indonesia (1997/1998). Penyesuaian terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menjadi faktor utama tingginya inflasi tahun 2005. Tingginya harga minyak di pasar internasional menyebabkan pemerintah berusaha untuk menghapuskan

⁴ Dwi Wahyuni. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia dari Sisi Penawaran Tahun 1998-2010*, Jurnal Ekonomi 2010, p.46-48

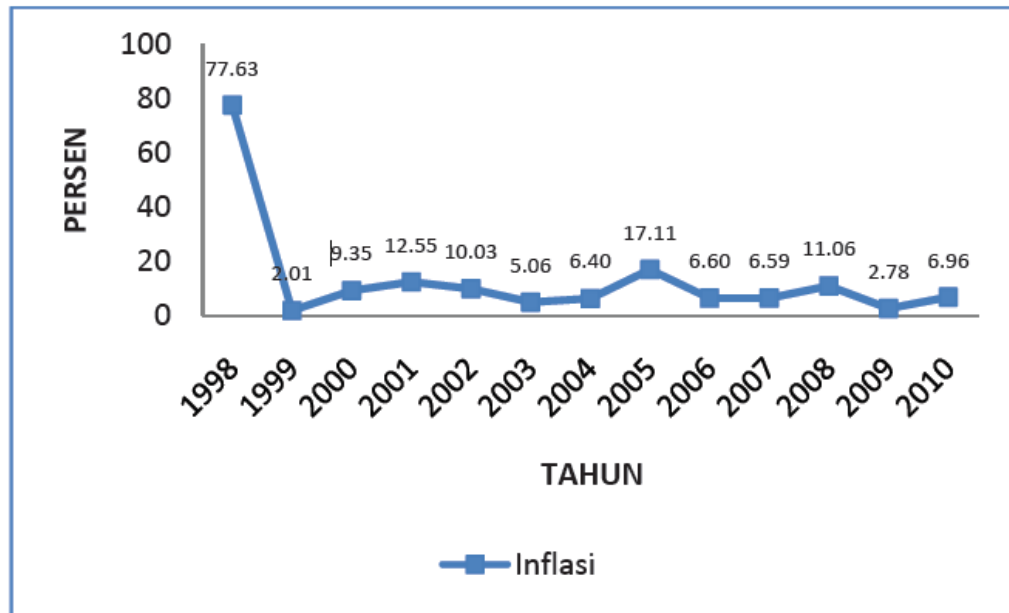
subsidi BBM. Jika melihat inflasi bulanan pada tahun 2005 yang tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 8,70 persen.

Laju inflasi selama tahun 2006-2007 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil yaitu berkisar pada 6 persen. Laju inflasi tahun 2006 sebesar 6,60 persen sedangkan pada tahun 2007 sebesar 6,59 persen. Laju inflasi bulanan tahun 2006 dan 2007 menunjukkan dalam kondisi yang stabil yaitu dibawah 5 persen. Tekanan inflasi yang cukup tinggi terjadi di bulan Januari tahun 2006 dan turun secara perlahan sampai nilainya dibawah 1 persen. Penurunan laju inflasi dikarenakan adanya penundaan kenaikan tarif dasar listrik oleh pemerintah.

Laju inflasi bulanan di tahun 2007 juga menunjukkan kondisi yang sama dengan tahun 2006 dimana nilainya masih di bawah 1,00 persen. Menjelang akhir tahun 2007, inflasi mengalami kenaikan yaitu dari 0,18 persen menjadi 1,10 persen. Kenaikan inflasi ini lebih disebabkan karena adanya kenaikan harga komoditas di dunia seperti minyak mentah, *CPO*, emas, dan gandum. Inflasi tahun 2008 mencapai 11,06 persen naik sebesar 4,47 persen bila dibandingkan dengan tahun 2007. Pada Januari tahun 2008 laju inflasi sebesar 1,77 persen. Inflasi bulanan tertinggi dicapai pada bulan Juni yaitu sebesar 2,46 persen. Inflasi pada tahun 2008 selain dipengaruhi oleh krisis keuangan global, juga dipengaruhi oleh inflasi harga yang diatur pemerintah dan bahan makanan yang bergejolak.

Laju inflasi tahun 2009-2010 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dimana pada tahun 2009 inflasi sebesar 2,78 persen dan tahun 2010 sebesar 6,96 persen. Untuk laju inflasi bulanan selama tahun 2009, nilainya masih dibawah 1 persen dan yang tertinggi dicapai pada bulan September sebesar 1,05 persen.

Selama tahun 2009, sempat terjadi deflasi yaitu pada bulan Januari, April dan November dengan deflasi terbesar terjadi di bulan April sebesar 0,31 persen.



Gambar I.1

Laju Inflasi di Indonesia Kurun Waktu 1998 – 2010

Sumber : BPS, diolah

Secara umum sejak pertengahan 1999, tingkat inflasi menurun tajam sebagai akibat diterapkannya kebijakan pengetatan moneter, mulai menurunnya harga barang hasil pertanian akibat kondisi penawaran yang membaik dan penguatan nilai rupiah terhadap mata uang asing secara bertahap. Indikator-indikator ekonomi makro lain pada saat yang sama juga mengalami perubahan. Meskipun lambat, perkembangan berbagai indikator ekonomi tersebut masih berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun begitu, tetap disadari bahwa perekonomian Indonesia masih mempunyai banyak masalah dan belum cukup kuat untuk menghadapi gejolak eksternal dan internal. Masalah eksese likuiditas, belum selarasnya strategi dan implementasi kebijakan antara fiskal dan moneter,

serta belum kuatnya daya tahan infrastruktur ekonomi terhadap guncangan eksternal, menjadi masalah terbuka yang penuh resiko. Hal ini akan terlihat ketika kondisi ketidakseimbangan keuangan global atau melonjaknya harga minyak internasional dengan sangat mudah berpengaruh terhadap ketidakstabilan makro ekonomi di dalam negeri. Nilai tukar akan berfluktuasi dan pengaruh buruk inflasi akan timbul kembali.

Bila dilihat perkembangan laju inflasi bulanan di tahun 2010-2012 masih mengalami angka yang fluktuatif. Laju inflasi bulanan di tahun 2010 yang tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 6,96 persen sedangkan laju inflasi bulanan terendah terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 3,43%. Inflasi tahun 2010 tersebut melampaui target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di awal tahun yaitu 5 ± 1 persen dan juga melampau target inflasi pemerintah sebesar 5,3 persen. Sementara pada tahun 2011 laju inflasi tertinggi terjadi pada awal tahun, bulan januari sebesar 7,02% dan berangsur menurun pada bulan-bulan berikutnya sampai pada bulan desember yang mana merupakan inflasi terendah di tahun 2011 sebesar 3,79%.

Inflasi inti tahun 2012 relatif terkendali, melanjutkan tren perlambatan inflasi yang terjadi sejak akhir tahun 2011. Pada Januari 2012 terjadi inflasi sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 130,90. Dari 66 kota, tercatat 62 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Banjarmasin 2,92 persen dengan IHK 139,35 dan terendah terjadi di Banda Aceh 0,02 persen dengan IHK 127,15. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini.

Tabel I.1
Laju Inflasi Bulanan Tahun 2010-2012

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Juni 2012	4.53 %
Mei 2012	4.45 %
April 2012	4.50 %
Maret 2012	3.97 %
Februari 2012	3.56 %
Januari 2012	3.65 %
Desember 2011	3.79 %
November 2011	4.15 %
Oktober 2011	4.42 %
September 2011	4.61 %
Agustus 2011	4.79 %
Juli 2011	4.61 %
Juni 2011	5.54 %
Mei 2011	5.98 %
April 2011	6.16 %
Maret 2011	6.65 %
Februari 2011	6.84 %
Januari 2011	7.02 %
Desember 2010	6.96 %
November 2010	6.33 %
Oktober 2010	5.67 %
September 2010	5.80 %
Agustus 2010	6.44 %
Juli 2010	6.22 %
Juni 2010	5.05 %
Mei 2010	4.16 %
April 2010	3.91 %
Maret 2010	3.43 %
Februari 2010	3.81 %
Januari 2010	3.72 %

Sumber : BPS, diolah

Bagi Indonesia dalam upaya membangun kembali perekonomian, tingkat inflasi yang tinggi harus dihindari sehingga momentum pembangunan menjadi

sehat dan kegairahan dunia usaha yang berada pada tingkat yang tinggi tetap dapat terpelihara. Namun kesemuanya itu tidaklah mudah dan memerlukan perhatian yang besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi sangat beragam sehingga perlu diketahui bagaimana perilaku inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, sehingga memudahkan pemerintah dalam menerapkan kebijaksanaan pengendalian inflasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, nilai tukar (*Exchange Rate*), defisit anggaran dan Produk Domestik Bruto Riil (PDB Riil).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi inflasi adalah jumlah uang yang beredar. Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti terdapat korelasi positif antara pertumbuhan uang (JUB) dan inflasi, yang dapat dijadikan prediksi teori kuantitas bahwa pertumbuhan uang yang tinggi mengarah pada inflasi yang tinggi sehingga pertumbuhan dalam money supply menentukan tingkat inflasi.

Tingkat suku bunga juga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga. Ketika tingkat harga tinggi dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan tingkat suku bunga tinggi yang diharapkan kemudian adalah berkurangnya jumlah uang beredar sehingga permintaan agregat pun akan berkurang dan kenaikan harga bisa diatasi. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, maka Bank

Indonesia menaikkan tingkat suku bunga SBI, yang mana kenaikan tingkat suku bunga SBI tersebut akan mempengaruhi tingkat bunga tabungan dan kredit pada bank umum (suku bunga kredit meningkat diatas tingkat suku bunga SBI), sehingga investasi pada sektor riil akan mengalami penurunan yang akan berdampak pada penurunan output (dengan asumsi permintaan konstan) sehingga akan menyebabkan tingkat harga semakin tinggi (inflasi semakin tinggi). Sehingga tingkat suku bunga mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat inflasi. Inflasi yang terjadi karena *cost-push inflation*.

Nilai tukar rupiah atau *exchange rate* yang selalu berfluktuatif berpengaruh terhadap biaya produksi karena dengan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat bahan baku yang diimpor dari negara lain menjadi lebih mahal dan membuat biaya produksi menjadi mahal dan akhirnya mendorong produsen untuk menaikkan harga jual di masyarakat. Keberadaan serikat pekerja yang selalu mendorong adanya kenaikan upah yang lebih tinggi sebagai tuntutan dari biaya hidup yang semakin mahal disatu sisi akan membuat biaya produksi naik dan sekali lagi akan membuat kenaikan harga jual produk di masyarakat.

Defisit anggaran juga mempengaruhi tingkat inflasi. Pembiayaan defisit anggaran di Indonesia, fakta sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia adalah sebagai bendahara pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk mendanai pengeluaran pemerintah (defisit anggaran) dengan mencetak uang (*money creation*), tentu saja pembiayaan ini akan menyebabkan meningkatnya *base money* (M0) dan mempengaruhi *moneysupply* (M1 dan M2) yang dapat berimbas pula pada tingkat inflasi.

Selain itu pengeluaran negara yang melebihi penerimaannya berarti anggaran negara itu ekspansif (defisit), artinya ada kecenderungan terhadap kenaikan harga-harga umum (inflasi). Mengapa, karena pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek dengan biaya besar dan berjangka lama, selama dalam pembangunan belum dapat menghasilkan dalam waktu yang cepat, tetapi sebaliknya, negara telah melakukan pengeluaran-pengeluaran, antara lain untuk upah buruh yang berakibat meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat di satu pihak, dan belum ada output yang dihasilkan di lain pihak, akan mendorong harga-harga umum akan meningkat, yang dampaknya adalah pada inflasi. Dalam masa pembangunan yang menggebu-gebu sulit bisa dihindarkan keadaan inflasi ini.

Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat inflasi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun.⁵ Kesempatan kerja dalam perekonomian akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat produksi atau pendapatan nasional yang dihasilkan. Dalam analisis IS-LM keseimbangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh interaksi keadaan di pasar uang dan pasar barang. Keseimbangan pendapatan nasional tercapai apabila sifat hubungan diantara suku bunga dengan pendapatan nasional yang berlaku di pasar barang adalah sama dengan yang berlaku di pasar uang, yaitu bila kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Dalam analisis IS-LM dapat diperhatikan efek

⁵ Teddy Herlambang, dkk. *Ekonomi Makro: Teori Analisis dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dijalankan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pendapatan riil masyarakat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Apabila pendapatan riil masyarakat turun maka inflasi akan meningkat.⁶

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka peneliti akan mengadakan penelitian mengenai pengaruh defisit anggaran dan nilai tukar rupiah terhadap inflasi di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dikemukakan identifikasi masalah yang dapat mempengaruhi tingginya inflasi, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Jumlah uang yang beredar
2. Rendahnya tingkat suku bunga
3. Adanya defisit anggaran pemerintah (kebijakan fiskal ekspansif)
4. Lemahnya nilai tukar rupiah
5. Rendahnya produk domestik bruto (PDB)

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas ternyata inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi antara lain : dana, waktu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah : “Pengaruh antara defisit anggaran

⁶ Sadono Sukirno, *op. cit.*, p. 241

pemerintah (kebijakan fiskal ekspansif) dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia.”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara defisit anggaran pemerintah terhadap inflasi?
2. Apakah terdapat pengaruh antara nilai tukar rupiah terhadap inflasi?
3. Apakah terdapat pengaruh antara defisit anggaran pemerintah dan nilai tukar rupiah terhadap inflasi?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan penambah sumber pengetahuan baru tentang defisit anggaran pemerintah dan nilai tukar serta pengaruhnya terhadap inflasi sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai salah satu instrument pemecahan masalah defisit anggaran pemerintah dan nilai tukar serta pengaruhnya terhadap inflasi.